

BAB V

KESIMPULAN

Pada tahapan ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Penerapan *Good Governance* Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Bekasi yakni:

UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 membawa dampak signifikan bagi pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi. Dampak positifnya termasuk penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, dan kemudahan akses layanan melalui platform *online*. Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bekasi semakin mudah dan efisien, DPMPTSP Kota Bekasi terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha. Saat ini, perizinan usaha di DPMPTSP Kota Bekasi telah lebih mudah dan efisien dengan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan berbagai upaya peningkatan lainnya. Meskipun masih ada beberapa tantangan seperti kompleksitas layanan dan kurangnya integrasi sistem, DPMPTSP Kota Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan iklim investasi melalui berbagai upayanya. Diharapkan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi publik, DPMPTSP Kota Bekasi dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penerapan *Good Governance* Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP di Kota Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada masyarakat. Penerapan *Good Governance* diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, penerapan sistem yang akuntabel dan dapat dipercaya, pelibatan aktif masyarakat dalam proses perizinan, optimalisasi efisiensi dan responsivitas pelayanan, serta penanaman nilai-nilai integritas dan etika dalam seluruh proses perizinan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, DPMPTSP Kota Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berbenah.

Persepsi Publik tentang penerapan *Good Governance* dalam pelayanan perizinan pada DPMPTSP di Kota Bekasi, memberikan penilaian positif terhadap penerapan *good governance* di DPMPTSP Kota Bekasi. Penerapan *good governance* dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi sudah menunjukkan kemajuan seperti penerapan sistem *online*, peningkatan transparansi informasi, dan partisipasi publik. Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti efektivitas dan efisiensi sistem online, edukasi, dan pengawasan, secara keseluruhan, penerapan *good governance* di DPMPTSP Kota Bekasi patut diapresiasi. Diharapkan dengan terus meningkatkan upaya dan komitmennya, DPMPTSP Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan perizinan yang semakin berkualitas, efektif, dan akuntabel, sehingga ultimately dapat mendukung iklim investasi yang kondusif di Kota Bekasi *Good Governance*

diharapkan dapat memberikan pelayanan perizinan usaha yang berkualitas, mendorong kegiatan bisnis dan investasi, dan pada akhirnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bekasi.

5.2.. Rekomendasi

5.2.1. Rekomendasi Akademik

Adapun rekomendari akademik dari penulis yakni:

- a. Dapat dijadikan referensi serta pertimbangan untuk menambah keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Negara terkait Penerapan *Good Governance* DPMPTSP Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Bekasi.
- b. Bagi peneliti berikutnya dihaapkan menerapkan penelitian serupa dengan metodologi serta desain yang berbeda sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal
- c. Bagi Universitas islam “45” bekasi dapat bermanfaat bagi mahasiswa serta dosen agar penelitian berikutnya lebih baik lagi.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Adapun rekomendasi berupa saran dari penulis yakni:

- a. Perlu adanya peningkatan efisiensi proses kerja, pengembangan kompetensi staf, dan pemanfaatan TIK juga perlu dipertimbangkan.penambahan di DPMPTSP di Kota Bekasi

- b. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi kinerja pegawai, meningkatkan sosialisasi kinerja pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi dan meningkatkan sosialisasi terkait informasi dan prosedur pengurusan izin usaha kepada Masyarakat.
- c. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan sistem *online* berjalan dengan efektif dan efisien.

